

GENDER DAN MODEL PENILAIAN KEADILAN

Faturochman

Universitas Gadjah Mada

Saparinah Sadli

Universitas Indonesia

Abstract

Men and women are treated differentially but women tend to be the victims of unjust treatment. It leads to the different schemas between men and women in justice judgment. The study shows that justice model between men and women is different. However, the main model of these two is similar, e.g. relational-dominated justice model. Besides the dominant influence of interactional justice, in the model of men welfare is significantly involved while in the model of women the other influencing variable is expectation.

Keyword: judgment, justice model, gender differences.

Dalam psikologi, ada dua hal yang sering dibicarakan dalam membahas prinsip keadilan, yaitu prosedur dan distribusi. Prosedur adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, di antaranya adalah ketetapan untuk distribusi. Di sini yang dimaksud prinsip distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan. Berkaitan dengan upaya pemerataan, pada umumnya yang disorot adalah distribusi yang adil. Diasumsikan bahwa terjadinya kesenjangan bersumber pada distribusi sumber daya yang kurang adil. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan perlu diterapkan prinsip-prinsip keadilan distributif. Permasalahannya, banyak prinsip keadilan distributif yang satu dengan lainnya tidak selalu selaras. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dimaksud harus didasarkan pada berbagai pertimbangan. Secara singkat pertimbangan yang dimaksudkan setidaknya-tidaknya meliputi kondisi sosial yang ada pada saat itu (Hagerty, 2000; Schmidt 1991), nilai-nilai yang dianut (Deutsch, 1975; Feather, 1994; Peterson, 1994), dan tujuan yang hendak dicapai (Corning, 2000; Tornblom, 1977). Kondisi sosial yang ada perlu

dicermati dengan seksama agar pemilihan prinsip keadilan distributif yang akan diterapkan dapat benar-benar menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada. Demikian pula, tujuan yang hendak dicapai perlu diformulasikan secara tepat sehingga lebih mengena pada sasaran.

Walaupun prinsip distribusi yang diterapkan dinilai oleh pembuat rumusan memadai dan adil untuk diterapkan, setiap individu yang peduli dengannya bisa menanggapi secara berbeda. Karenanya, kondisi objektif ini dapat berbenturan dengan kepentingan individu. Pemberian upah pekerja yang didasarkan pada prinsip kebutuhan, misalnya melalui penentuan upah minimum provinsi (UMP), dianggap tidak sesuai karena produktivitas pekerja tidak dipertimbangkan, padahal para pekerja itu selalu dituntut untuk produktif (Faturachman, 1995; 1998). Sementara itu, prinsip proporsional dalam telaah gender untuk memecahkan masalah-masalah perempuan dinilai belum saatnya diterapkan karena kriteria untuk membagi mengakibatkan keuntungan yang lebih besar bagi laki-laki (Martin & Jurik, 1996). Ketika posisi, kesempatan, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan telah sejajar dan bias-bias kriteria tidak ada, maka prinsip proporsional dapat diterapkan.

Kemajuan dalam berbagai bidang juga mempunyai konsekuensi pada masalah keadilan. Tuntutan masyarakat tidak sebatas pada distribusi yang adil, tetapi juga pada proses penentuan distribusi tersebut (Lind & Tyler, 1988). Dalam terminologi keadilan, hal ini dikenal sebagai keadilan prosedural. Masalah ini tampaknya semakin dirasakan penting karena letaknya yang strategis, dalam arti dapat mendahului distribusi itu sendiri. Tampaknya keadilan prosedural ini memiliki pengaruh sosial yang lebih besar dibandingkan dengan keadilan distributif, terutama ketika suatu komunitas atau masyarakat telah berada pada tingkat pengetahuan dan kesejahteraan yang relatif tinggi.

Perkembangan selanjutnya dalam kajian psikologi tentang keadilan mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya model penilaian keadilan yang dikemukakan oleh Tom Tyler (1989, 1994). Model ini

setidaknya mensintesakan empat teori. Pertama adalah *resource-based model* untuk menjelaskan penilaian keadilan distributif. Kedua adalah *self interest model* untuk menjelaskan penilaian keadilan prosedural. Ketiga adalah *group value model* yang juga menjelaskan penilaian keadilan prosedural. Keempat adalah teori deprivasi relatif yang menjelaskan dampak penilaian kedua keadilan tersebut. Model tersebut pernah diterapkan di Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa model yang dimaksud cukup komprehensif (Faturochman, 2002). Gambar 1 menunjukkan model yang dimaksudkan.

Gambar 1 di sini

Ada satu hal yang menarik ketika membicarakan keadilan dan penilaian keadilan yang harus dicatat dengan cermat, yaitu masalah gender. Gender sebagai definisi (kontruksi) sosial yang membedakan peran, kedudukan, perilaku, dan perbedaan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan dalam penilaian sosial. Banyak teori dan kajian psikologi (misalnya Beall & Sternberg, 1993; Jackson dkk., 1992) yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Dari berbagai kajian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa psikodinamika gender berlangsung sejak individu dilahirkan hingga akhir hayatnya. Adapun latar belakang dari dinamika itu bermula dari asumsi adanya perbedaan secara biopsikologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dijadikan dasar untuk memberi atribut yang berbeda antara keduanya. Karenanya, laki-laki mempelajari dan mengadopsi maskulinitas yang memiliki ciri dominan dan *self-reliance*, sementara perempuan belajar dan menginternalisasi femininitas sehingga menjadi suka mengalah dan hangat.

Kategorisasi seperti disebutkan itu disosialisasikan dan harus diterima oleh individu yang akan melekat sebagai bagian dari karakteristik kepribadiannya. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan tersebut, berbagai hal yang menyangkut kehidupan dikaitkan dengan atribut tersebut seperti pekerjaan-pekerjaan tertentu yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada

pembatasan dalam hal peran yang dinilai cocok bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, stereotipe laki-laki dan perempuan yang ada harus diterima dan diinternalisasi oleh individu. Apabila ini benar-benar terjadi maka secara kognitif akan terbentuk *schema* gender. Skema ini akan diperkuat oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan berperilaku, menempati posisi, dan berperan secara berbeda (Cross & Markus, 1993; Korabik, 1997). Dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan juga berbeda. Perbedaan ini terus berlangsung hingga mengarah pada diskriminasi yang merugikan perempuan.

Keadaan laki-laki dan perempuan yang demikian itu dapat menyebabkan munculnya perbedaan dalam penilaian sosial di antara mereka. Penilaian sosial sebagai proses kognitif berpeluang besar menjadi bias karena perbedaan dan pembedaan tersebut. Beberapa bias yang dimaksud di antaranya adalah bias fundamental, bias konsensus, dan *self-fulfilling prophecy* (Geis, 1993). Bias fundamental terjadi ketika atribut dikenakan secara tidak konsisten pada laki-laki dan perempuan. Dalam hal kesuksesan, misalnya, laki-laki yang sukses dinilai sebagai konsekuensi dari kemampuannya, namun bagi perempuan hal itu dianggap karena peran pihak luar. Dalam hal konsensus bisa terjadi juga bias karena, misalnya, banyaknya perempuan yang tidak bekerja sering diterima sebagai akibat ketidakmampuan mereka. Konsensus ini dapat mengalahkan pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak bekerja karena tidak ada atau kurangnya kesempatan yang diberikan kepada mereka. Konsensus seperti ini bisa menjadi bias karena di dalamnya tidak dilakukan pengujian secara kritis dan sifat dari konsensus memang demikian. Sementara itu, bias *self-fulfilling prophecy* terjadi karena ada konsekuensi timbal balik antara keyakinan (kognitif) dan perilaku. Keyakinan bahwa perempuan lemah menyebabkan seseorang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, perempuan yang posisinya rendah dibiarkan karena perempuan dianggap lemah.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berawal dari penekanan pada perbedaan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan tersebut menjadi bagian dari cara pandang dan perlakuan terhadap laki-laki dan

perempuan. Karena kuatnya sistem kemasyarakatan dan budaya yang berlaku menyebabkan laki-laki dan, khususnya, perempuan menerima perbedaan itu. Pada sisi lain, mulai muncul kesadaran di antara kelompok-kelompok yang peduli keadilan bahwa sistem yang ada dinilai tidak adil sehingga perempuan mengalami deprivasi (Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1984). Oleh karena itu munculah berbagai upaya untuk mengubah sistem yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara lebih adil. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya itu belum sepenuhnya mencapai hasil. Oleh karena itu masalah gender ini masih berpengaruh besar terhadap dinamika psikologis seperti dalam penilaian sosial.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam melakukan penilaian sosial karena skema kognitif yang terbentuk berbeda (Cross & Markus, 1993). Perbedaan tersebut dapat terjadi juga karena ada perubahan orientasi yang akhir-akhir ini terjadi. Beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi, di antaranya, diuraikan berikut ini.

Pertama, laki-laki sering lebih berorientasi pada hal-hal instrumental sedangkan perempuan lebih menekankan ekspresivitas (Korabik, 1997). Orientasi instrumental pada laki-laki dapat mengarahkan mereka untuk lebih menekankan pencapaian seperti kesejahteraan yang dapat membawanya pada kepuasan. Ekspresivitas pada perempuan bisa berarti bahwa akan lebih menghayati berbagai hal yang dialami secara tahap demi tahap.

Kedua, deprivasi yang lebih berat dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki bisa menyebabkan mereka memiliki harapan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupannya (Crosby, 1982; Crosby & Gonzales-Intal, 1983; Devasia & Devasia, 1990). Besarnya harapan bila dikaitkan dengan ekspresivitas memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kepuasan pada setiap langkah yang dijalani. Laki-laki yang pada umumnya menempati posisi lebih baik akan mengupayakan pada pencapaian target dan menilai kepuasan dari keberhasilannya.

Ketiga, skema maskulinitas berasosiasi dengan orientasi keterpisahan sedangkan skema femininitas berasosiasi dengan orientasi keterkaitan (Cross & Markus, 1993). Laki-laki yang menggunakan skema maskulinitas dapat dengan mudah berpikir dan bertindak secara berbeda-beda. Laki-laki mungkin lebih sedikit mengalami disonansi kognitif. Sebaliknya, perempuan lebih berorientasi pada keterkaitan yang akan mengarahkan pada upaya-upaya untuk keselarasan. Dalam menilai dan berpendapat laki-laki mungkin kurang memperhatikan konsistensi.

Keempat, kesempatan (akses) dan kontrol antara laki-laki dan perempuan berbeda di mana perempuan memilikinya secara lebih terbatas dibanding laki-laki (Abdullah, 2001). Penilaian terhadap akses dan kontrol pada laki-laki tentunya akan berbeda dibandingkan pada perempuan.

Kelima, gender sebagai kategorisasi membuka peluang terjadi perbandingan di antara kedua kategori yang ada. Kenyataan menunjukkan bahwa laki-laki menjadi pihak yang mendominasi perempuan. Hal ini akan membawa dampak pada proses penilaian sosial yang melibatkan perbandingan. Penilaian yang dilakukan oleh perempuan bisa dibatasi oleh adanya dominasi laki-laki sehingga untuk hal-hal tertentu perempuan bisa terhambat dalam menilai. Dengan kata lain, perempuan akan lebih terbatas dalam menilai dibanding laki-laki (Jackson dkk., 1992).

Adanya perbedaan-perbedaan dalam penilaian sosial antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi sosial membuka peluang terjadinya perbedaan model dalam penilaian keadilan. Sayangnya, sejauh ini belum ada studi yang mengungkap permasalahan ini yang dapat digunakan untuk memprediksi perbedaan model penilaian keadilan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, uraian terdahulu dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa model penilaian keadilan pada laki-laki akan berbeda dengan model penilaian keadilan pada perempuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pada laki-laki dan perempuan tanpa memformulasikannya dalam hipotesis yang spesifik karena belum kuatnya dasar teori dan masih terbatasnya hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan hipotesis.

Dari kajian yang ada bisa diperkirakan bahwa model penilaian keadilan pada laki-laki berbeda dengan model penilaian keadilan pada perempuan.

Metode

Variabel. Penelitian ini merupakan survai yang dilakukan oleh Faturochman dalam menyusun disertasi yang antara lain dibimbing oleh Saparinah Sadli. Dari kajian teoretis sebelumnya beberapa variabel penelitian yang dilibatkan secara garis besar meliputi variabel anteseden penilaian keadilan, penilaian keadilan, dan variabel kepuasan sebagai salah satu dampak atau reaksi dari keadilan.

- a. Variabel anteseden penilaian keadilan:
 - 1) kesejahteraan
 - 2) harapan
 - 3) kontrol
 - 4) penilaian keadilan interaksional
- b. Variabel penilaian keadilan:
 - 1) penilaian keadilan distributif
 - 2) penilaian keadilan prosedural
- c. Kepuasan terhadap kerja sama yang dijalin.

Instrumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran psikologis untuk semua variabel yang dilibatkan. Skala ini dikembangkan berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan dari hasil studi pendahuluan, khususnya dalam mengembangkan item-itemnya. Dengan demikian, skala yang terdiri dari beberapa pernyataan (item) yang disesuaikan kondisi setempat akan direspons oleh responden berdasar pilihan jawaban yang tersedia yang masing-masing berskala empat.

Area. Fokus kajian penilaian keadilan dalam psikologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerja sama antara dua pihak, yaitu antara petani pemilik sawah dengan PT. Perkebunan Nusantara X Unit Tembakau Klaten (disingkat PTPN X). Sejak zaman pemerintahan Belanda petani di sekitar Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten diharuskan menyewakan tanahnya kepada penguasa melalui perusahaan tembakau untuk ditanami tembakau. Pada saat penelitian akan dilakukan petani juga harus melakukan hal serupa melalui Surat Keputusan Bupati Klaten yang dikeluarkan setiap tahun. Berdasarkan SK Bupati Klaten No. 525.2/1049/1997 dan No. 525.2/454/1997 tampak bahwa pihak petani dan PTPN X harus melakukan kerja sama. Secara singkat ketentuan itu menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, petani sebagai pemilik sawah harus menyerahkan tanah kepada PTPN X untuk ditanami jenis tembakau yang sesuai dengan kondisi tanahnya. Kedua, pada setiap desa pemilik sawah dikelompokkan menjadi dua dan setiap tahun secara bergantian hanya ada satu kelompok yang diharuskan menyerahkan lahan untuk ditanami tembakau. Ketiga, selama tidak dalam proses penanaman tembakau, lahan tersebut boleh dikerjakan oleh petani. Dalam satu tahun masih ada sisa beberapa bulan untuk ditanami jenis tanaman lain oleh petani atau pemilik. Keempat, sebagai imbalan, petani akan mendapatkan pembagian uang sesuai dengan produktivitas dan luas lahan pada tahun itu. Kelima, untuk mengoptimalkan produksi tembakau, petani diminta terlibat dalam pengolahan lahan. Keterlibatan yang dimaksud bisa dalam bentuk kontrol proses penanaman yang tidak mendapatkan imbalan langsung seperti mengawasi irigasi, pemupukan, dan penimbangan hasil. Selain itu, dimungkinkan adanya keterlibatan yang memerlukan energi tindakan langsung seperti mencangkul, membersihkan lahan, menyemprot hama, memetik, dan lainnya dengan diberi imbalan sesuai dengan upah yang berlaku di bawah koordinasi perusahaan (PTPN X).

Kontrak antara petani dengan perusahaan tembakau di atas sangat sesuai dengan arah penelitian ini yang mengkaji prosedur dan distribusi sekaligus. Di luar ketentuan bahwa petani harus menyerahkan sawah untuk digarap pihak PTPN, mereka masih memiliki kewenangan dalam mengontrol prosedur, terutama hal-hal yang teknis. Salah

satu hal yang belum jelas dalam ketentuan tersebut adalah kesempatan petani untuk mengontrol keputusan yang terkait dengan pembagian yang nantinya akan mereka terima. Penelitian di lapangan nantinya diharapkan dapat mengungkap fakta objektifnya. Di samping itu, diharapkan kajian penilaian keadilan seperti pada penelitian ini juga menjadi komplemen kajian objektif itu.

Responden. Pada tahap pengambilan data survai dengan menggunakan angket ditargetkan responden sekitar 500 orang. Pengambilan data melalui skala dilakukan berdasarkan teknik acak (*random*) dari sejumlah orang yang memenuhi kriteria dan yang akan dibuat daftarnya terlebih dulu. Kriteria yang paling pokok sesuai dengan fokus penelitian adalah memiliki sawah yang disewa oleh PTPN X setidaknya-tidaknya sekali dalam dua tahun terakhir.

Dari rencana mendapatkan 500 responden, hanya 475 responden yang dapat diwawancarai. Empat responden tidak diperhitungkan dalam analisis karena sebagian besar datanya tidak didapatkan. Mereka adalah responden yang mengalami kesulitan memahami pertanyaan atau tidak dapat menjawabnya. Oleh karena itu, akhirnya hanya ada 471 responden yang datanya dipaparkan pada uraian selanjutnya. Responden perempuan berjumlah 121 dan responden laki-laki berjumlah 350. Perbedaan jumlah ini sesuai dengan proporsi pemilik sawah berdasarkan keadaan di lapangan. Artinya, perempuan yang secara formal memiliki sawah jumlahnya lebih kecil dibanding laki-laki.

Analisis. Data angket survai dan skala pengukuran psikologis berupa data kuantitatif. Untuk menguji hipotesis pertama digunakan teknik analisis model persamaan struktural (*structural equation model*), khususnya analisis jalur, yang terdiri dari tiga variabel dependen dan empat variabel independen (Gambar 1). Artinya, dalam analisis ini semua variabel dianggap sebagai variabel manifes (*observed variables*), bukan sebagai variabel laten.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki model yang dirancang sesuai dengan data lapangan. Hal ini dibuktikan oleh kai kuadrat yang tidak signifikan, indeks kesesuaian yang sempurna ($GFI = 1$), dan SMSR sama dengan 0. Secara kebetulan koefisien determinasi pada kedua kelompok tersebut juga sama, yaitu 0,59 yang dapat digolongkan tinggi. Meskipun demikian, kedua model tersebut perlu direspesifikasi sehingga ditemukan model yang lebih sederhana. Dua alasan yang digunakan untuk melakukannya yaitu terdapat beberapa parameter dalam model yang tidak signifikan dan angka-angka uji kecocokan tersebut tampak *over fitted*. Dalam hal ini respesifikasi dilakukan dengan jalan mereduksi parameter-parameter yang memiliki peran tidak signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan memodifikasinya diperoleh model yang lebih sederhana seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

GAMBAR 2 & 3 DI SINI

Pada kelompok perempuan variabel yang berperan langsung terhadap penilaian keadilan prosedural adalah penilaian keadilan interaksional dan peran tersebut tergolong besar ($\gamma = 0,61$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$). Variabel yang berperan terhadap keadilan distributif adalah harapan dan penilaian keadilan interaksional. Peran harapan signifikan dan arahnya negatif ($\gamma = -0,15$; $p = 0,014$). Peran penilaian keadilan interaksional positif ($\gamma = 0,33$) dan sangat signifikan ($p = 0,001$). Penilaian keadilan prosedural itu berperan secara positif dan sangat signifikan terhadap penilaian keadilan distributif ($\beta = 0,43$; $p = 0,001$). Berbeda dengan model awal, penilaian keadilan prosedural pada kelompok perempuan tidak berperan secara signifikan terhadap kepuasan. Keadilan distributif berperan positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan ($\beta = 0,69$; $p = 0,001$). Sebagai variabel dependen, penilaian keadilan prosedural dapat dijelaskan dalam model ini sebesar 0,40, penilaian keadilan distributif sebesar 0,51, dan kepuasan sebesar 0,48.

Pada kelompok laki-laki (Gambar 3), anteseden penilaian keadilan prosedural adalah penilaian keadilan interaksional ($\gamma = 0,68$) yang perannya sangat signifikan ($p = 0,001$). Penilaian keadilan interaksional juga menjadi anteseden penilaian keadilan distributif dengan efek sebesar 0,29 ($p = 0,001$) dan kesejahteraan yang efeknya sebesar 0,07 ($p = 0,044$). Peran penilaian keadilan prosedural terhadap penilaian keadilan distributif ($\beta = 0,45$) sangat signifikan ($p = 0,001$) dan kedua penilaian keadilan ini berperan secara sangat signifikan terhadap kepuasan dengan bobot beta secara berurutan masing-masing sebesar 0,44 ($p = 0,001$) dan 0,36 ($p = 0,001$). Sebagai variabel dependen, penilaian keadilan prosedural dapat dijelaskan dalam model ini sebesar 0,46, penilaian keadilan distributif sebesar 0,48, dan kepuasan sebesar 0,53.

Bila dilihat secara lebih detil, model pada kelompok perempuan tampak sedikit lebih sederhana. Apabila model umum penilaian keadilan interaksional memiliki efek yang paling menonjol sehingga modelnya dapat disebut model dominasi keadilan relasional (Faturachman, 2002), pada kelompok laki-laki dan perempuan dominasi relasional juga muncul. Hasil tersebut juga tampak sejalan dengan kajian-kajian terdahulu. Dilihat dari skor rata-ratanya berbagai variabel dalam model, perempuan cenderung memiliki harapan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Tabel 1). Hal ini terjadi karena perempuan dikonstruksi untuk lebih menerima keadaan meskipun ia diperlakukan tidak adil. Sejauh ini akses perempuan terhadap sumber daya lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki (Abdullah, 2001). Ketidakadilan ini tampak dalam model kelompok perempuan yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya efek kesejahteraan terhadap penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan distributif, dan kepuasan. Sebaliknya, model pada kelompok laki-laki menunjukkan efek kesejahteraan terhadap ketiga variabel tersebut signifikan. Dari model kelompok perempuan juga terlihat bahwa penilaian keadilan prosedural tidak mempunyai efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa perempuan tidak memperoleh kepuasan dari prosedur atau proses yang ada. Dalam kenyataannya, perempuan sering mengalami marginalisasi pada proses pengambilan keputusan (Fakih, 1996). Oleh karena itu, mereka akan sulit mendapatkan kepuasan dari proses tersebut karena tidak banyak mengalaminya. Pada semua model yang sudah diuji, variabel kontrol

tidak mempunyai efek langsung yang signifikan terhadap ketiga variabel dependen. Dalam berbagai kajian keadilan, kontrol menjadi variabel penting untuk terciptanya keadilan. Fakta penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dinilai rendah. Hal ini terjadi, antara lain, karena belum efektifnya kontrol seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dipaparkan.

Tabel 1
Rata-Rata dan Deviasi Standar Variabel-Variabel dalam Model
berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel		Perempuan	Laki-laki	Total	Hipotetis
Kesejahteraan	Rata-rata	24,01	24,25	24,21	25,00
	Deviasi	3,09	2,77	2,83	
Harapan	Rata-rata	21,51	22,16	21,99	22,50
	Deviasi	2,61	2,67	2,67	
Kontrol	Rata-rata	32,11	32,42	32,34	35,00
	Deviasi	5,96	5,41	5,55	
Keadilan interaksional	Rata-rata	36,22	36,18	36,19	37,50
	Deviasi	3,34	3,87	3,76	
Keadilan prosedural	Rata-rata	36,82	35,81	36,11	37,50
	Deviasi	4,24	4,83	4,70	
Keadilan distributif	Rata-rata	30,77	30,52	30,57	32,50
	Deviasi	3,38	4,08	3,91	
Kepuasan	Rata-rata	42,13	41,37	41,56	42,50
	Deviasi	5,61	6,18	6,04	

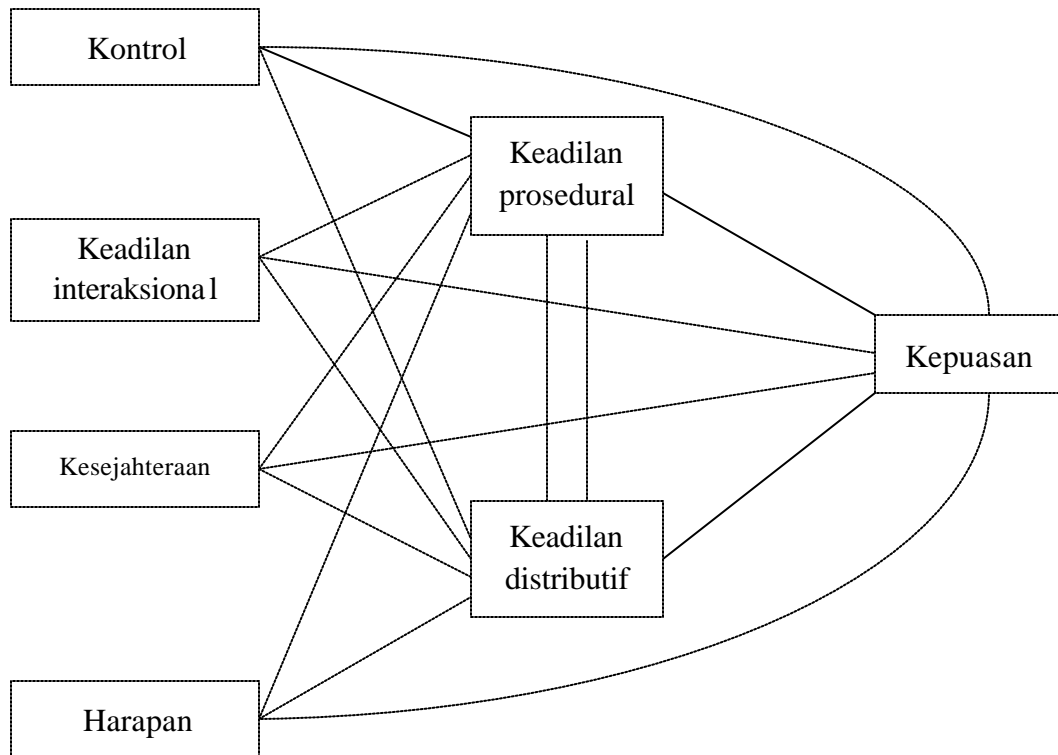
Kesimpulan

Baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan model penilaian keadilan sama-sama didominasi oleh orientasi relasional. Meskipun demikian ada perbedaan yang menyolok antara keduanya yaitu signifikansi peran harapan pada kelompok perempuan sementara pada kelompok laki-laki justru kesejahteraan yang berperan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada perempuan masih ada harapan yang perlu dipertimbangkan karena selama ini mereka lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki.

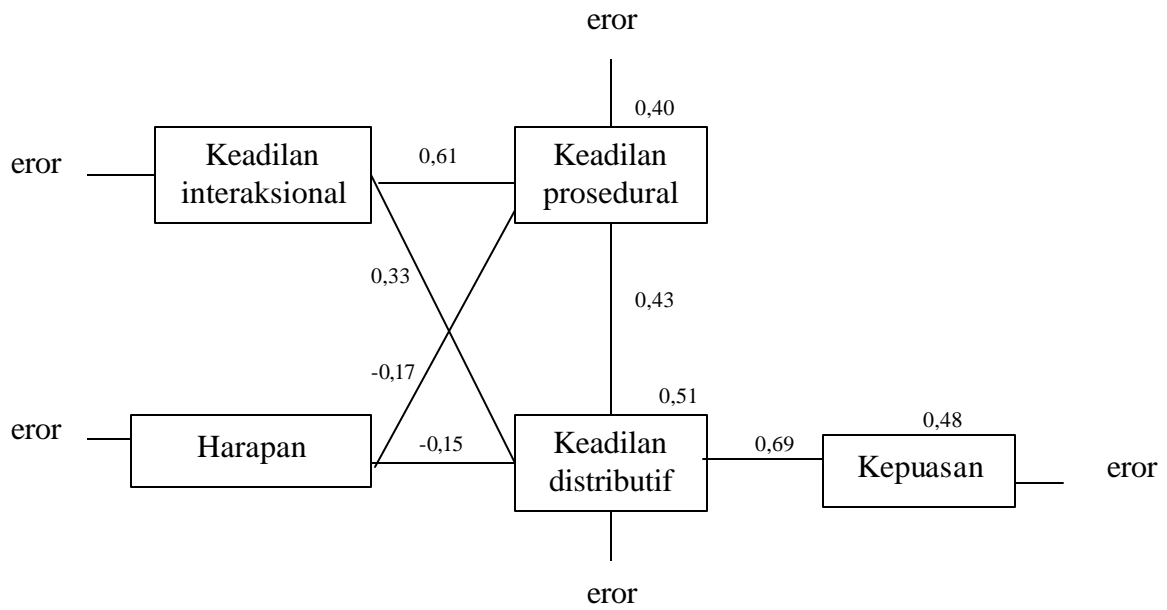
Kepustakaan

- Abdullah, I. (2001). Masalah Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan Nasional. Dalam Faturochman & Dwiyanto, A. (eds.). *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (1993.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- Corning, A.F. (2000). Assessing Perceived Social Inequity: A Relative Deprivation Framework. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(3), 463-477.
- Crosby, F. (1982). *Relative Deprivation and Working Woman*. Oxford University Press, New York.
- Crosby, F. & Gonzales-Intal, A.M. (1984). Relative Deprivation and Equity Theory: Felt Injustice and Undeserved Benefits of Others. In Folger, R. (ed.). *The Sense of Injustice: Social Psychological Perspectives*. Plenum, New York.
- Cross, S.E. & Markus, H.R. (1993). Gender in Thought, Belief, and Action: A Cognitive Approach. In Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (eds.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- Deutsch, M. (1975). Equity, Equality, and Need: What Determines Which Values Will be Used as the Basis of Distributive Justice? *Journal of Social Issues*, 31, 137-150.
- Devasia, L. & Devasia, V.V. (1990). *Women in India: Equity, Social Justice and Development*. Indian Social Institute, New Delhi.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faturochman (1995). Penilaian dan Evaluasi terhadap Pembagian Upah. *Jurnal Psikologi*, 22(2), 36-48.
- Faturochman (1998). Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. *Jurnal Psikologi*, 25(2), 1-15.
- Faturochman (2002). Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Feather, N.T. (1994). Human Values and Their Relation to Justice. *Journal of Social Issues*, 50(4), 129-151.
- Geis, F.L. (1993). Self-Fulfilling Prophecies: A Social Psychological View of Gender. In Beall, A.E. & Sternberg, R.J. (eds.). *The Psychology of Gender*. Guilford Press, New York.
- Hagerty, M.R. (2000). Social Comparisons of Income in One's Community: Evidence from National Surveys of Income and Happiness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 764-771.

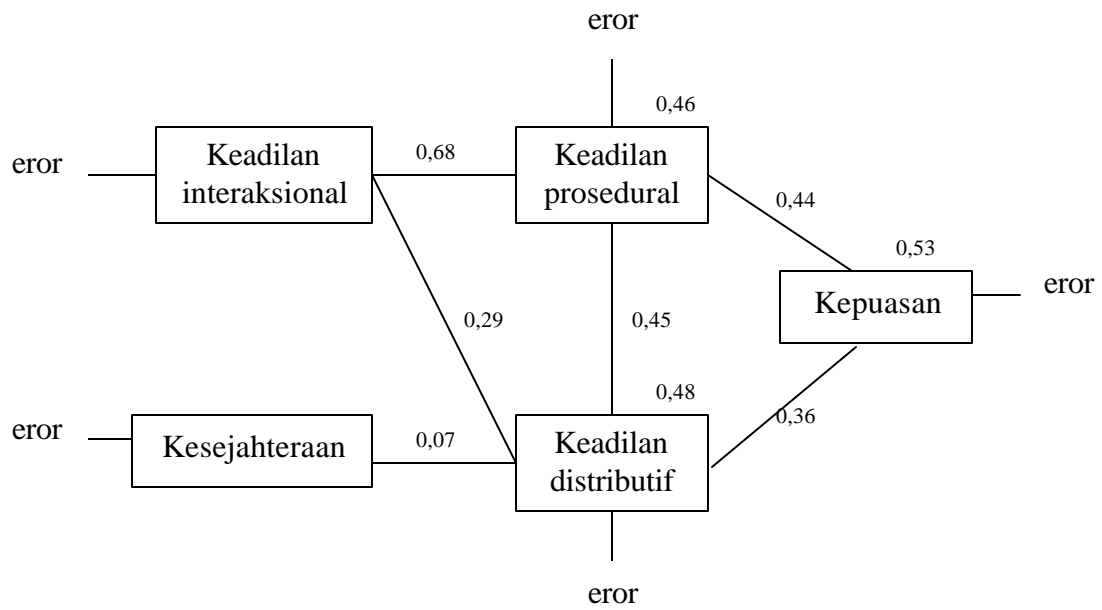
- Jackson, L.A., Gardner, P.D. & Sullivan, L.A. (1992). Explaining Gender Differences in Self-Pay Expectations: Social Comparison Standards and Perceptions of Fair Pay. *Journal of Applied Psychology*, 77(5), 651-663.
- Korabik, K. (1997). Applied Gender Issues. In Sadava, S.W. & McCreary, D.R. (eds.). *Applied Social Psychology*. Prentice-Hall, Inc., London.
- Lind, E. A. & Tyler, T.R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. Plenum Press, New York.
- Martin, S.E. & Jurik, N.C. (1996). *Doing Justice Doing Gender*. Sage Publications, London.
- Peterson, R.S. (1994). The Role of Values in Predicting Fairness Judgments and Support of Affirmative Action. *Journal of Social Issues*, 50, 95-115.
- Schmidt, V.H. (1991). Adaptive Justice: Local Distributive Justice in Sociological Perspective. Working Paper No. 1/91, Centre for Social Policy Research, University of Bremen, Bremen.
- Tornblom, K.Y. (1977). Distributive Justice: Typology and Propositions. *Human Relations*, 30, 1-24.
- Tyler, T.R. (1989). The Psychology of Procedural Justice: A Test of the Group-Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(5), 830-838.
- Tyler, T. R. (1994). Psychological Models of Justice Motive: Antecedents of Distributive and Procedural Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(5), 850-863.



Gambar 1
Pengembangan Model Penilaian Keadilan
(Faturachman, 2000)



Gambar 2
Model Penilaian Keadilan pada Perempuan



Gambar 3
Model Penilaian Keadilan pada Laki-Laki

